



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG EKONOMI PERAWATAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya perawatan terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kondisi rentan lainnya merupakan kerja mendasar yang menopang keberlangsungan kehidupan, dan berkontribusi terhadap pembangunan manusia serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga diperlukan penyusunan peraturan presiden untuk memperkuat kontribusi kerja perawatan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG EKONOMI PERAWATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan

Presiden ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Presiden tentang Ekonomi Perawatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan; dan
 - c. melaporkan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian/pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan dan/atau permasalahan yang dihadapi.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG EKONOMI PERAWATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penanggung Jawab:	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Ketua:	Amurwani Dwi Lestariningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
IV.	Wakil Ketua:	1. Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
		2. Eni Widiyanti	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
V.	Sekretaris:	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
VI.	Anggota:	1. Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Titi Eko Rahayu	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. A. Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Zahrotun Nihayah	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perempuan dan Politik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		9. Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Iip Ilham Firman	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13. Nani Dwi Wahyuni	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		15. Margareth Robin Korwa	Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16. Prijadi Santoso	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		17. Muhammad Ihsan	Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		18. Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		19. Nia Reviani	Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		20. Syarip Hidayat	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		21. M. Samsuri	Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		22. Syachrudin	Penata Layanan Operasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		23. Reza Fikri Febriansyah	Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Hukum, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		24. Bastian	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		25. Agatha Widianawati	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
		26. C. Heru Widiyanto	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
		27. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan
		28. Henny Navilah	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koperasi
		29. Niken Wulandari	Asisten Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi
		30. Lina Widiyastuti	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi
		31. Restuardy Daud	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		32. Agus Fatoni	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
		33. Cheka Virgowansyah	Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
		34. Wisnu Gunadi	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kementerian Koperasi
		35. R. Gani Muhammad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
		36. Paudah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
		37. Yedi Sabaryadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
		38. Ikana Yossye Ardianingsih	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian
		39. Mocharom Ashadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		40. Wahyudi Putra	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		41. Hasim	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		42. Rizi Umi Utami	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
		43. Imran Pambudi	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan
		44. Hendrastuti Pertiwi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
		45. Indah Febrianti	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
		46. Sri Rejeki Nawangsasih	Plt. Kepala Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		47. Rachmat	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		48. Chairul Saleh	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		49. Fepti Wijayanti	Analisis Hukum Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		50. Qurrota A'yun	Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		51. Ari Prasetyo	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		52. Muhammad Ali Akbar	Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		53. Andrey Ikhsan Lubis	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		54. Niken Ariati	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		55. Ema Widiati	Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		56. Jani Arjanto	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		57. Edy Sutriono	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		58. Kreshnariza Harahap	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		59. Tati Meilani Kacaribu	Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		60. Agus Wahidin	Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		61. Dwi Saponingrum Junaedi	Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		62. Tio Serepina Siahaan	Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan
		63. Pande Putu Oka Kusumawardani	Direktur Strategi Perpajakan, Kementerian Keuangan
		64. Kurnia Chairi	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
		65. Didik Kusnaini	Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan
		66. Purwitohadi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Strategi Perpajakan, Kementerian Keuangan
		67. Wahyu Hidayat	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Strategi Perpajakan, Kementerian Keuangan
		68. Andreas Dipi Patria	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
		69. Rahayu	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
		70. Eko Susanto	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		71. Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		72. Rahayu	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
		73. Lukijanto	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
		74. Ika Kusuma Permana Sari	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kementerian Pariwisata
		75. Rike Wijayanti Octaviana	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri
		76. Tody Baskoro	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola dan Diplomasi Pelindungan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri
		77. Indri Ardini Kesuma	Fungsional Diplomat Ahli Madya, Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Luar Negeri
		78. Devi Melissa Silalahi	Fungsional Diplomat Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri
		79. Bondhet Suryonurwendo	Fungsional Diplomat Ahli Pertama, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri
		80. Trophy Endah Rahayu	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pusat Statistik



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		81. Kisworowati	Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		82. Rahmad Asri Ritonga	Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		83. Ari Dwi Aryani	Deputi Direksi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Organisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		84. Iswandy Hary Saputra Simanjuntak	Asisten Deputi Hukum Kelembagaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		85. Ario Bintaro	<i>Legal Expert</i> , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
VII.	Sekretariat:	1. Maya Septiyana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Davip Arya Bhima	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		4. Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Robby Prawira N	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Makna Sinatria	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Mega Haditia	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		11. Grace Melda Yovita	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Achmad Fachrurrozie	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13. Ario Pratama S	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI